

ANALISIS KEBIJAKAN: PENGEMBANGAN USAHA SEKTOR PERIKANAN PADA KAWASAN EKONOMI KHUSUS SORONG

Edy Supardi ¹⁾, Muh Izhar Dfinubun ²⁾, Sofyan Muhamad ³⁾

^{1,2,3} Universitas Pendidikan Muhamamdiyah Sorong, Indonesia.

E-mail Koresponden: edysupardy12061966@gmail.com

Abstrak

Kabupaten Sorong dan Kota Sorong merupakan wilayah di sebelah Barat Papua yang sangat strategis karena menjadi 'pintu masuk' ke Provinsi Papua lainnya. Wilayah terdekat Kabupaten Sorong adalah Kota Sorong sebagai kota perdagangan dan industri jasa, sedangkan Kabupaten Sorong merupakan kawasan dengan sumber daya alam sangat potensial untuk dikembangkan yang dapat membuka peluang investasi seluas-luasnya. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah kawasan dengan batas tertentu untuk melaksanakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Kawasan tersebut disiapkan untuk memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lainnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi. KEK Sorong yang terletak di Selat Sele memberikan keunggulan geoekonomi yaitu potensi di bidang perikanan dan transportasi laut. Lokasi ini juga sangat strategis untuk pengembangan industri logistik, agroindustri, dan pertambangan, sehingga KEK Sorong didesain pengembangannya sesuai dengan 3 (tiga) potensi tersebut dan diprediksi akan menghasilkan investasi sebesar Rp 32,2 triliun pada tahun 2025. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alternatif kebijakan KEK Sorong terhadap pertumbuhan ekonomi di sektor usaha perikanan dan kelautan terutama di Provinsi Papua Barat yang dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif menggunakan metode display analysis, serta untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi wilayah di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Hasil penelitian ini merekomendasikan perlunya stakeholders mengembangkan teknologi moderen pada industri rumah tangga (home industry) dan industri pengolahan ikan berskala besar pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong dan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya.

Kata kunci: Kebijakan; Pertumbuhan Ekonomi; Kawasan Ekonomi Khusus; Sorong; Papua Barat Daya.

Abstract

Sorong Regency and Sorong City are regions in the western part of Papua that are very strategic because they serve as the 'gateway' to other provinces in Papua. The closest area to Sorong Regency is Sorong City, which is a trade and service industry city, while Sorong Regency is an area with highly potential natural resources for development that can open up extensive investment opportunities. Special Economic Zones (SEZ) are areas with specific boundaries designated to perform economic functions and obtain certain facilities. These areas are prepared to maximize industrial activities, export, import, and other economic activities that have high economic value. KEK Sorong, located in the Sele Strait, offers geo-economic advantages, particularly in the fields of fisheries and maritime transportation. This location is also very strategic for the development of logistics, agro-industry, and mining industries, so KEK Sorong is designed to develop according to these three potentials and is predicted to generate an investment of Rp 32.2 trillion by 2025. This study aims to analyze alternative policies for the Sorong Special Economic Zone (SEZ) on economic growth in the fisheries and maritime sectors, particularly in West Papua Province, using a descriptive qualitative approach with display analysis method. It also seeks to identify the supporting and inhibiting factors affecting regional economic growth in West Papua and Southwest Papua. The results of this study recommend that stakeholders develop modern technology in the home industry and large-scale fish processing industry in the Sorong Special Economic Zone (KEK) and positively impact the economic growth of West Papua Province and Southwest Papua Province.

Key words: Policy; Economic Growth; Special Economic Zone; Sorong; Southwest Papua.

Article History:

Received : 2022-10-04

Revised : 2022-11-05

Accepted : 2022-12-20

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia selama lebih dari 20 tahun telah mencoba mendorong pembangunan di wilayah Timur Indonesia dengan berbagai kebijakan. Semuanya diikuti oleh transfer fiskal ke daerah timur untuk berbagai program pengembangan wilayah. Namun

sayangnya sejak tahun 2000 hingga kini kesenjangan ekonomi antara wilayah timur dan barat Indonesia hampir tidak mengalami perbaikan. Menggunakan indeks Williamson yang mengukur kesenjangan ekonomi antar wilayah, rata-rata indeks dari 34 provinsi di Indonesia mengalami terhenti pada kisaran 0,79. Dalam Indeks Williamson semakin besar berarti mendekati 1 ekonomi wilayah sangat senjang dan jika mengecil mendekati 0 menunjukkan ekonomi wilayah yang sangat merata. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada kuartal ketiga 2019 struktur ekonomi Indonesia didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera yang masing-masing menyumbang 59,15% and 21,14% untuk produk domestik bruto (PDB), sementara di bagian timur seperti Maluku dan Papua masing-masing hanya berkontribusi 3,06% dan 2,27% ke PDB.

Sejak tahun 1993, pemerintah telah berupaya mendorong roda ekonomi di Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang meliputi Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku dan Papua. Berbagai macam upaya sudah dilakukan seperti pembentukan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) di wilayah Timur yang merupakan wilayah geografis potensial dan perlu investasi, serta pembentukan Kawasan Andalan sebagai kawasan budi daya strategis nasional. Tentu saja semua ini perlu didukung oleh pengembangan otonomi daerah dan pemerintah yang menyediakan infrastruktur, fasilitas, dan insentif serta kemudahan berinvestasi di kawasan-kawasan tersebut. Contohnya investor di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) akan mendapatkan fasilitas fiskal tax holiday atau libur bayar pajak. Saat ini, dua belas dari 13 Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia sebagian besar berada di wilayah Timur Indonesia, seperti : di Kabupaten Sorong, Sulawesi Tengah, kota Morotai, Maluku Utara, dan kota Sorong, Papua Barat.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada tahun 2010 mengevaluasi kebijakan pemerintah terkait persoalan kegagalan implementasi kebijakan nasional dalam mengembangkan Kawasan Timur Indonesia dan pemerataan pertumbuhan ekonomi wilayah, menyimpulkan beberapa alasan mengapa kebijakan itu tidak efektif dengan mengidentifikasi beberapa penyebab kegagalan pada Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) maupun Kawasan Andalan KEK di Indonesia, antara lain: implementasi kebijakan yang tidak efektif, insentif dari pemerintah tidak menarik bagi investor, persoalan birokrasi, kebijakan yang belum tepat sasaran, pendekatan yang salah dan prioritas pasar. Penyebab utama kesenjangan ekonomi wilayah adalah kesenjangan produktivitas, atau jumlah barang yang diproduksi suatu populasi dalam suatu waktu, maka solusinya adalah pemerataan produktivitas. Pemerataan produktivitas akan terwujud jika negara secara bertahap mampu mengatasi berbagai kesenjangan antara lain kesenjangan pelayanan dan kualitas pendidikan, kesenjangan pelayanan dan kualitas kesehatan, kesenjangan ketersediaan air bersih dan sanitasi, kesenjangan ketersediaan energi listrik, kesenjangan dukungan infrastruktur permukiman, dan kesenjangan dukungan infrastruktur pengetahuan termasuk infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. (Abdini, 2020).

Oleh karenanya, di awal era pemerintahan presiden Joko Widodo (2014-2019) mengagendakan sembilan prioritas pembangunan (Nawacita). Salah satu upaya untuk mengimplementasikan Nawacita adalah dengan membangun Indonesia dari pinggiran dengan peningkatan sektor-sektor strategis melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Hal ini diperkuat dengan diluncurkannya Paket Kebijakan Ekonomi VI pada 5 November 2015 yang menitik-beratkan salah satunya pada pengembangan 8 (delapan) Kawasan Ekonomi Khusus. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Kerangka peraturan yang lebih rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). KEK didefinisikan sebagai kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum NKRI yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Secara umum pengembangan KEK di Indonesia merupakan terobosan pemerintah untuk membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui pengolahan potensi sumber daya alam lokal yang dimiliki secara efisien dan optimal. Dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru diharapkan dapat menarik investasi, mendorong kegiatan ekspor, impor dan kegiatan ekonomi

lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi serta dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), mengingat terdapat masalah yang cukup mengkhawatirkan, yaitu jumlah pencari kerja yang semakin meningkat. Berdasarkan data BPS Kabupaten Sorong tahun 2016 – 2019 terjadi peningkatan jumlah pengangguran di Kota Sorong dan Kabupaten Sorong sebanyak 45.746 orang, sehingga perlu adanya perluasan lapangan kerja atau dengan menambah lapangan kerja baru, disesuaikan potensi yang dimiliki Provinsi Papua Barat, terutama di sektor pertanian, perkebunan, industri, pertambangan dan kelautan/maritim.

Selanjutnya, dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Pemerintah menargetkan pengembangan hingga 25 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), meliputi pengembangan KEK yang sudah ada, serta pembentukan 17 KEK baru yang diutamakan di luar Jawa, serta kebijakan-kebijakan baru. Serangkaian regulasi terkait dengan fasilitas dan kemudahan di KEK juga telah diselesaikan dalam rangka mendukung terwujudnya KEK. Sampai dengan bulan Agustus 2016, Pemerintah telah menetapkan 10 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), masing-masing adalah KEK Sei Mangkei Sumatera Utara, KEK Tanjung Lesung Banten, KEK Palu Sulawesi Tengah, KEK Bitung Sulawesi Utara, KEK Mandalika Nusa Tenggara Barat, KEK Morotai Maluku Utara, KEK Tanjung Api-Api Sumatera Selatan, KEK MBTK Kalimantan Timur, dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong-Papua Barat Daya. Untuk KEK Sorong ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2016, dan pengoperasian secara resmi pada Jumat, 11 Oktober 2019, peresmian dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Hal ini sejalan dengan target pemerintah untuk mengembangkan KEK baru di luar Jawa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia Timur. KEK Sorong ini beroperasi diatas lahan seluas 523,7 hektare dan difokuskan pada kegiatan industri, seperti : industri galangan kapal, industri pengolahan hasil pertanian, kehutanan dan perikanan, dan juga industri pertambangan. Kegiatan utama di KEK Sorong meliputi industri pengolahan nikel, pengolahan kelapa sawit, hasil hutan dan perkebunan (sagu), perikanan tangkap dan budidaya serta pembangunan pergudangan logistik. Kawasan Ekonomi Khusus Sorong diproyeksikan akan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 15.024 orang.

Seiring rencana strategis pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong yang disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah Provinsi Papua Barat tahun 2013-2033 (sebagaimana Perda Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2013), khususnya pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka pertumbuhan ekonomi wilayah di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya (tahap persiapan pemerintahan definitif dan operasional secara umum), maka perlu diketahui terlebih dahulu salah satu potensi andalan yang dimiliki Kabupaten Sorong yang dapat dikembangkan secara maksimal, terencana dan terpadu (berkelanjutan) adalah potensi perikanan dan kelautan seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Produksi dan Nilai Produksi Perikanan serta Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Papua Barat

Tahun	Produksi (Kg)	Nilai Produksi (Rp.)	Kontribusi terhadap PAD (Rp.)	Ket.
2015	32.793.680	51.666.754.400	516.667.454	1%
2016	33.177.740	62.232.490.100	308.929.960	0,40%
2017	39.549.961	75.470.171.500	721.966.629	0,95%
2018	44.020.611	104.756.167.000	987.183.586	0,95%
2019	47.741.089	137.245.005.500	1.418.827.552	0,95%

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua Barat (2020)

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat jumlah produksi perikanan/hasil tangkapan ikan yang terus meningkat dari tahun ke tahun, meski prosentase kenaikan setiap tahunnya memiliki kecenderungan menurun. Begitu pula nilai produksinya seperti yang ditunjukkan pada tabel 1 di atas, meski kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) besar namun prosentase kenaikan setiap tahun cenderung turun.

Potensi kelautan/maritim Provinsi Papua Barat memiliki prospek besar dan menjanjikan apalagi jika ditunjang oleh industri perikanan modern yang memiliki linkages, baik forward ataupun backward, tentu akan menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi terhadap produk yang dihasilkan sekaligus membuka peluang kerja dan peluang pasar yang besar pula. Sayangnya, saat ini kebijakan pembangunan untuk program UMKM masih difokuskan pada industri rumah tangga (home industry) berskala kecil dan menengah terutama industri olahan perikanan yang dilakukan secara tradisional atau secara manual, mengingat sumbangannya yang besar terhadap total sektor industri (99,90 persen) sehingga inovasi untuk mengembangkan industri perikanan moderen berskala menengah bahkan berskala besar sudah barang tentu harus mulai dilakukan, tentunya dengan perhitungan yang matang terhadap seluruh aspek dan implikasinya baik mulai proses penangkapan, pengolahan atau produksi hingga pemasarannya sudah harus diprogramkan secara teliti, cermat, penuh kehati-hatian dan prospektif, tentunya menjadi tugas dan perhatian bersama antara stakeholders dan masyarakat.

Tabel 2. Potensi Sarana-Prasarana dan Pelaku Usaha Perikanan

No.	Potensi	Jumlah
1	Tempat Pelelangan Ikan (Unit)	3
2	Kapal Perikanan (Unit)	
	- Kapal Motor (ukuran 10 GT)	112
	- Motor Tempel (katinting, uk. < 1 GT)	39
	- Perahu motor (ukuran < 3 GT)	1.323
	- Perahu Tanpa Motor (ukuran < 1GT)	522
	- Bagan	30
3	Nelayan (Orang)	
	- Pemilik/Juragan	584
	- Buruh (Pandega)	12.579
4	Alat tangkap ikan berbagai jenis (unit)	9.053

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sorong (2019)

Dari tabel 2 di atas dapat diketahui jumlah nelayan Provinsi Papua Barat sebanyak 13.163 orang, namun nelayan pemilik kapal/juragan hanya berjumlah 584 orang dengan jumlah keseluruhan kapal yang ada sebanyak 1.996 unit. Meski potensi kelautan Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Barat cukup menjanjikan, ternyata hanya sedikit komunitas atau masyarakat nelayan maupun pembudidaya ikan yang tertarik pada bidang pengolahan hasil perikanan tangkap dan hasil budidaya, sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3. Jumlah Pengolah, Pengumpul dan Bakul Ikan

No.	Jenis Usaha	Jumlah
1	Pengolah ikan segar, udang dan kepiting	69
2	Pengolah ikan asin	61
3	Pengolah ikan fillet	42
4	Pengolah ikan pengasapan	64
5	Pengolah ikan terasi	11
6	Pengolah ikan pindang	5
7	Pengolah krupuk ikan	9
8	Pengumpul Benih/	5

9	Bakul ikan	
	- Bakul besar	40
	- Bakul sedang	166
	- Bakul kecil	83

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sorong (2019)

Nilai ekonomi produk olahan hasil laut sebenarnya lebih tinggi daripada dijual secara langsung berupa hasil tangkapan atau budidaya ikan mentah, namun usaha pengolahan hasil laut dan budi daya ikan ini dalam kemasan atau siap saji masih belum banyak diproduksi dan pada umumnya masih dikerjakan dalam industri rumah tangga (home industri) berskala kecil itupun dengan cara tradisional, dan jumlah pelakunya tidak banyak. Hingga saat ini belum ada investor yang mau menanamkan investasi usahanya di sektor industri pengolahan ikan modern dengan teknologi berskala menengah maupun tinggi. Padahal industri ini sangat menjanjikan dan membuka peluang kerja yang besar sebagaimana yang telah diprogramkan oleh Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus RI. melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong.

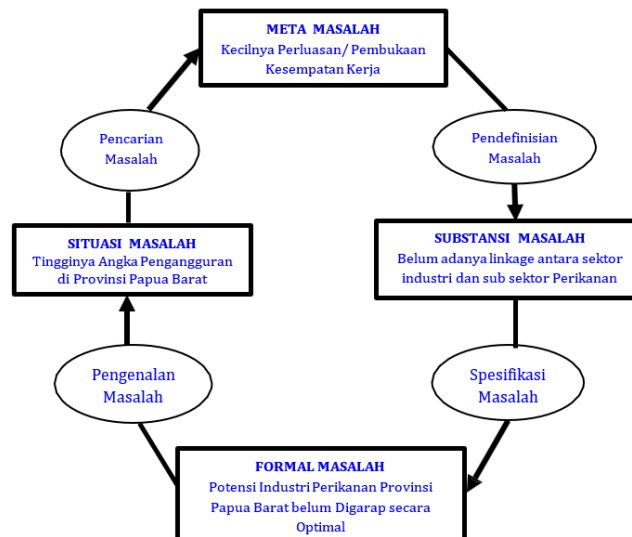
Menurut Dunn (1998), separuh proses analisis kebijakan sudah dapat dicapai jika analisis berhasil merumuskan masalah secara tepat. Kesalahan dalam merumuskan suatu masalah akan membuat rangkaian analisis kebijakan mengalami kesalahan pula. Prasyarat merumuskan masalah adalah pengakuan terhadap keberadaan suatu situasi masalah. Berdasarkan uraian sebelumnya, telah dijelaskan situasi masalah mengenai peningkatan jumlah angka pencari kerja dan jumlah pengangguran di Kota Sorong dan Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat dari tahun ke tahun. Data BPS Kabupaten Sorong tahun 2019 menunjukkan bahwa peningkatan jumlah pencari kerja dari tahun 2016 ke 2019 mencapai 45.746 orang. Padahal jika melihat jumlah pendapatan per kapita, nilai PDRB serta PAD Provinsi Papua Barat, terjadi kenaikan dari waktu ke waktu.

Tanpa adanya strategi atau kebijakan baru di sektor industri dan sub sektor perikanan, kaitannya dengan semakin meningkatnya jumlah angka pencari kerja/pengangguran, maka dapat diramalkan permasalahan-permasalahan di masa yang akan datang sebagai berikut :

- a. Jumlah penduduk akan bertambah pada 5 hingga 10 tahun yang akan datang, demikian pula jumlah penduduk angkatan kerja akan semakin meningkat. Seandainya jumlah lapangan kerja tidak bertambah akan menimbulkan peningkatan jumlah pengangguran yang pada akhirnya dapat mengakibatkan kerawanan sosial.
- b. Provinsi Papua Barat yang sebenarnya memiliki potensi besar di sektor industri dan sub sektor perikanan namun tidak digarap secara optimal, tidak akan dapat merealisasikan visinya menjadikan kota dan wilayah sekitarnya sebagai pusat industri, perdagangan, jasa dan kelautan/maritim disebabkan tidak adanya linkages dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi antar sektor.

Dengan demikian optimalisasi potensi industri perikanan dan kelautan mutlak diperlukan melalui linkages antara sektor industri dan sub sektor perikanan sehingga nantinya dapat membuka sekaligus memperluas kesempatan kerja yang dapat menampung pencari kerja guna mengurangi angka pengangguran di Provinsi Papua Barat. Pembukaan dan perluasan lapangan kerja baru sangat mungkin dilakukan mengingat pelaku usaha pengolahan hasil laut yang memiliki nilai ekonomi tinggi masih kecil jumlahnya dan masih menggunakan cara-cara tradisional dalam proses pengolahannya.

Berdasarkan uraian di atas, secara skematis permasalahan kebijakan terhadap optimalisasi potensi industri perikanan Provinsi Papua Barat yang belum digarap secara optimal dapat digambarkan sebagai berikut :



Sumber : William N. Dunn (1998 : 137)

Gambar 1. Skema Pemetaan Masalah Kebijakan

Tujuan yang hendak dicapai dari kebijakan sektor industri perikanan dan kelautan pada Kawasan Ekonomi Khusus Sorong adalah sebagai berikut :

1. Mengolah potensi kelautan Provinsi Papua Barat secara optimal.
2. Mengembangkan industri perikanan masyarakat terpadu.
3. Meningkatkan peran serta swasta dan masyarakat nelayan.
4. Menciptakan kemudahan administrasi bagi pelaku usaha pengolahan hasil kelautan.
5. Menjaga ekosistem perikanan dan kelautan.

METODE PENELITIAN

Ada beberapa teori atau paradigma pembangunan yang sering digunakan sebagai acuan pembangunan di suatu negara, wilayah atau suatu daerah. Diantaranya adalah paradigma pertumbuhan yang menginterpretasikan pembangunan melalui indikator-indikator ekonomi makro, seperti laju pertumbuhan ekonomi, PDRB, pendapatan per kapita dan lain-lain. Menurut teori Harrold-Domar, pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh besarnya investasi (capital) dan tabungan (saving ratio). Daerah yang menggunakan paradigma pertumbuhan dalam strategi pembangunannya pasti akan berupaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya meski harus tidak berorientasi pada pemerataan. Sedangkan paradigma Neo Ekonomi, yakni paradigma yang menekankan pada pemerataan pertumbuhan nasional, prestasi pembangunan suatu negara atau daerah diukur dari 3 (tiga) dimensi, yaitu : kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran. Jika suatu daerah berhasil menurunkan angka kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran, maka daerah tersebut akan dipandang berhasil dalam pembangunannya. Program-program pembangunan harus secara spesifik ditujukan pada penanggulangan masalah kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran.

Keselarasan visi-misi pembangunan Kabupaten Sorong, Kota Sorong dan Provinsi Papua Barat dari tahun 2014 – 2024 menjadi kunci penting dalam pertumbuhan ekonomi wilayah, dimana Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) RI. telah menetapkan Provinsi Papua Barat sebagai pusat industri, perdagangan, jasa dan maritim yang mempunyai daya saing dan dapat menciptakan iklim kondusif bagi setiap kegiatan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan bagi warganya. Melalui penggabungan paradigma pertumbuhan dan paradigma neo klasik dalam strategi pembangunan, bisa jadi visi yang telah ditetapkan dapat diwujudkan. Sebab penambahan investasi dan tabungan sangat diperlukan khususnya dalam meningkatkan dan mengembangkan sektor industri dan maritim. Dengan menggunakan strategi pertumbuhan tidak berimbang (un-balance growth) investasi dapat diarahkan pada kegiatan ekonomi tertentu yang memiliki keterkaitan ke depan atau ke belakang secara optimal (forward & backward linkages). Sedangkan penurunan angka kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran merupakan suatu prestasi yang menunjukkan bahwa pembangunan di Kabupaten Sorong berhasil. Sampai saat ini kebijakan sektor industri Provinsi Papua Barat

masih difokuskan pada peningkatan industri rumah tangga/kecil/sedang. Sedangkan kebijakan di sub sektor perikanan ada dua, yaitu program pengembangan sumber daya, sarana dan prasarana perikanan serta program pembangunan masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan. Jadi belum ada kebijakan yang memadukan sektor industri, khususnya industri berskala besar yang dapat menyerap banyak tenaga kerja dengan sub sektor perikanan. Padahal melihat potensi kelautan Provinsi Papua Barat dan prospek pengembangan industri, keduanya dapat dipadukan melalui program maupun kegiatan yang memiliki forward & backward linkages terutama di bidang pengolahan hasil kelautan. Untuk menetapkan alternatif kebijakan, penentuan kriteria dapat melihat dari tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Mengolah potensi kelautan Provinsi Papua Barat secara optimal.
2. Mengembangkan industri perikanan masyarakat secara terpadu.
3. Meningkatkan peran serta swasta dan komunitas nelayan.
4. Menciptakan kemudahan administrasi bagi pelaku usaha pengolahan hasil kelautan.
5. Menjaga ekosistem perikanan dan kelautan.

Dari kelima tujuan di atas maka dapat ditentukan kriteria-kriterianya :

- a. Kapasitas produksi perikanan laut.
- b. Penggunaan mesin berteknologi menengah untuk mengolah ikan.
- c. Dampak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sorong.
- d. Dampak terhadap nilai produksi sektor perikanan dan kelautan.
- e. Investasi yang dibutuhkan untuk pengembangan usaha pengolahan ikan.
- f. Dukungan masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan.
- g. Dukungan pengusaha atau investor.
- h. Dampak terhadap perluasan kesempatan kerja.
- i. Dampak terhadap pencari kerja.
- j. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
- k. Dampak terhadap lingkungan biota laut dan pelestarian alam.

Setelah menetapkan alternatif-alternatif kebijakan, maka perlu dilakukan penilaian pada setiap alternatif tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengevaluasi apakah suatu alternatif kebijakan tertentu memiliki skor yang tinggi dan layak untuk direkomendasikan kepada policy maker. Ada beberapa kategori yang digunakan untuk menilai beberapa alternatif kebijakan, yaitu :

1. Technical Feasibility
2. Economic/Financial Feasibility
3. Political Acceptability
4. Legal Feasibility
5. Administrative Operability
6. Social Acceptability

Alternatif-alternatif kebijakan akan dinilai dengan menggunakan skor yang telah ditentukan. Skor dari masing-masing alternatif tersebut dijumlah dan ditentukan rangkingnya. Alternatif yang mempunyai skor tertinggi akan mendapat rangking tertinggi begitu pula sebaliknya. Disamping itu, perlu juga diketahui forecasting dari masing-masing kategori penilaian.

1. Forecasting Mengolah Potensi Kelautan Kabupaten Sorong secara Optimal Untuk mengukur upaya mengolah potensi kelautan Provinsi Papua Barat secara optimal digunakan 2 buah kriteria, yaitu : kapasitas produksi perikanan laut dan penggunaan mesin pengolah ikan.
2. Forecasting Mengembangkan Industri Perikanan Masyarakat Terpadu Untuk mengukurnya digunakan 3 buah kriteria, yaitu : dampak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Papua Barat, dampak terhadap nilai produk dan investasi yang dibutuhkan usaha pengolahan ikan .
3. Forecasting Meningkatkan Peran Serta Swasta dan Masyarakat Nelayan Ada 4 kriteria yang digunakan, yaitu : dukungan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan serta dukungan pengusaha/investor, dampak terhadap perluasan kesempatan kerja dan dampak terhadap pencari kerja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk merekomendasikan suatu tindakan kebijakan khusus, diperlukan adanya informasi tentang konsekuensi-konsekuensi di masa depan setelah dilakukan berbagai alternatif tindakan. Sementara itu membuat rekomendasi kebijakan juga mengharuskan kita menentukan alternatif mana yang paling baik dan mengapa (Dunn, 1998 : 141). Kemudian menurut Sofian Effendi (2004) ada beberapa metode perbandingan atau evaluasi alternatif antara lain Paired Comparison, Metode satisficing, Metode Lexicographic ordering, Metode non dominated alternative, Metode equivalen alternative, standart alternative method dan matrik display system.

Dalam mengevaluasi alternatif kebijakan yang menjadi fokus sasaran adalah mengerjakan potensi perikanan dan kelautan Kabupaten Sorong secara optimal, dipilih metode Matrik Display System sehingga dalam mengambil keputusan memilih skor tertinggi dari kriteria yang ada. Tetapi tidak selamanya pilihan rasional atau skor tertinggi merupakan pilihan terbaik karena masing-masing ada pertimbangan kelebihan dan kekurangannya.

Tabel 4. Matriks Penilaian Alternatif Kebijakan

Tujuan	Kriteria	Alternatif Kebijakan		
		Status Quo	Mengembangkan Teknologi Modern pada Home Industri dan Industri Pengolahan Ikan Kecil/Menengah	Mengembangkan Linkages Industri Perikanan Modern
1. Mengolah potensi kelautan secara optimal	a. Kapasitas produk olahan hasil Laut dan budidaya	sedang 2	sedang 2	besar 3
	b. Penggunaan mesin pengolahan ikan	kecil 1	sedang 2	tinggi 3
2. Mengembangkan Industri perikanan Masy. Terpadu	c. Dampak terhadap PAD	tinggi 3	sedang 2	tinggi 3
	d. Dampak terhadap nilai produksi	sedang 2	sedang 2	tinggi 3
	e. Investasi yang dibutuhkan	kecil 3	sedang 2	tinggi 1
3. Meningkatkan Peran	f. Dukungan masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan	sedang 2	tinggi 3	tinggi 3
	g. Dukungan pengusaha atau investor	kecil 1	sedang 2	tinggi 3

Serta Swasta & Masy.	h. Dampak terhadap Perluasan kesempatan kerja	kecil 1	sedang 2	tinggi 3
	i. Dampak terhadap peluang kerja	kecil 1	sedang 2	tinggi 3
4. Menciptakan Kemudahan Adm. bagi pelaku usaha pengolahan ikan	j. Pelaksanaan peraturan-Perundang-undangan	mudah 3	mudah 3	sulit 1
5. Menjaga Ekosistem	k. Dampak lingkungan	kecil 3	kecil 3	tinggi 1
Total Skor		23	25	27

Berdasarkan total skor, ternyata skor tertinggi berada pada alternatif kebijakan mengembangkan linkages industri perikanan modern yaitu memperoleh total skor 27 hanya beda 2 poin dengan total skor alternatif kebijakan mengembangkan teknologi modern pada home industri dan industri pengolahan ikan berskala kecil dan menengah yang hanya memperoleh total skor 25.

KESIMPULAN

Dalam rekomendasi kebijakan tidak hanya diperlukan pendekatan yang empiris atau evaluatif saja tetapi juga diperlukan pendekatan normatif, karena menyangkut rencana aksi atau rencana tindakan (action plan) mana yang tepat sehingga masalahnya dapat dipecahkan. Untuk merekomendasikan satu alternatif, pihak analis harus memberikan sejumlah karakteristik khusus dari alternatif tersebut. Ada beberapa karakteristik khusus yang harus diperhatikan dalam merekomendasikan suatu alternatif. (Dunn, 1998 : 139).

1. Dapat ditindaklanjuti, artinya suatu alternatif kebijakan itu harus dilaksanakan dapat ditindaklanjuti untuk menyelesaikan masalah kebijakan.
2. Prospektif, artinya setiap alternatif kebijakan yang telah direkomendasikan memiliki peluang masa depan yang sangat baik.
3. Mengandung unsur nilai, memiliki konsekuensi yang terprediksi atau terukur .
4. Secara etis kompleks, artinya nilai-nilai yang mendasari pernyataan analis yang merekomendasikan alternatif tertentu secara etika bersifat kompleks, komprehensif dan terpadu. Nilai tersebut dapat dipahami sebagai nilai intrinsik maupun ekstrinsik.

Dari hasil evaluasi alternatif-alternatif yang telah diperoleh, diketahui bahwa alternatif kebijakan mengembangkan teknologi moderen pada home industri dan industri pengolahan ikan berskala kecil dan menengah memiliki total skor yang tidak jauh dengan total skor alternatif kebijakan mengembangkan linkages industri perikanan moderen yaitu 25 dan 27. Melihat kemampuan finansial daerah dan waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kebijakan, maka atas berbagai pertimbangan dan kriteria sebagaimana diuraikan di atas, analis lebih merekomendasikan alternatif kedua, yaitu kebijakan mengembangkan teknologi modern pada home industri dan industri pengolahan ikan berskala kecil dan menengah, terutama untuk kebijakan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi wilayah di Provinsi Papua

Barat serta Kabupaten Sorong dan Kota Sorong pada khususnya dalam jangka waktu pendek dan menengah.

Agar tindakan kebijakan mengembangkan teknologi modern pada home industri dan industri pengolahan ikan berskala kecil dan menengah dapat diimplementasikan dengan baik, perlu adanya faktor-faktor penunjang, diantaranya :

1. Perencanaan

Pada tahap perencanaan, seluruh instansi terkait di sektor industri dan sub sektor perikanan atau instansi yang menguasai secara teknis membuat satu perencanaan terpadu tentang proyek pengembangan teknologi modern pada seluruh kegiatan home industri dan industri pengolahan ikan hasil tangkap dan budidaya berskala kecil dan menengah lengkap dengan anggaran yang diperlukan. Selanjutnya proposal proyek tersebut dikonsultasikan di tingkat eksekutif sebelum akhirnya diajukan dihadapan sidang DPRD Kabupaten Sorong untuk memperoleh persetujuan legislatif agar dapat dimasukkan dalam APBD Provinsi Papua Barat Daya (terkait pelaksanaan Otonomi Daerah (Daerah Otonomi Baru)).

2. Pelaksanaan

Setelah legislatif memberikan persetujuan terhadap program-program kerja (proyek) untuk mengimplementasikan kebijakan mengembangkan teknologi moderen pada home industri dan industri pengolahan ikan hasil tangkap dan budidaya berskala kecil dan menengah dan kemudian APBD Provinsi Papua Barat Daya disahkan maka instansi teknis yaitu Bappeda, Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Tanaman Pangan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Bagian Perekonomian serta Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Sorong mulai melaksanakan proyek-proyek tersebut. Proyek-proyek tersebut dapat berupa bantuan pengadaan mesin-mesin pengolah ikan kepada para pengusaha pengolah ikan berprestasi, bantuan kredit lunak untuk membeli mesin-mesin pengolah ikan kepada para pengusaha pengolahan ikan dan juga pengusaha di sektor industri pembuatan mesin-mesin pengolah ikan (berikut limbahnya), proyek pembinaan dan pemberdayaan masyarakat pantai dan pembudidaya ikan khususnya dalam penggunaan peralatan dengan teknologi moderen.

3. Pengawasan

Proses pengawasan dapat dilakukan oleh DPRD Provinsi Papua Barat Daya, Badan Pengawas Daerah Provinsi Papua Barat Daya, Forum Masyarakat Pantai Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Barat, beberapa LSM yang ada di Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Barat serta pers lokal. Pengawasan dilakukan semenjak perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi seluruh program kegiatan.

Reference

- Abdini, Chairil, (2020). Alasan Mengapa Usaha Pengembangan Wilayah Indonesia Timur Belum Berhasil, dan Solusinya, Jurnal Administrasi Publik diterbitkan: Maret 10, 2020 (9.15 am WIB), Program PascaSarjana Administrasi Publik - FISIP Universitas Indonesia, Jakarta. <https://theconversation.com/alasan-mengapa-usaha-pengembangan-wilayah-indonesia-timur-belum-berhasil-dan-solusinya-127628>
- Adisasmita, H. Rahardjo, (2005). Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah. Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Arsyad, Lincoln, (2005). Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah (edisi kedua). Penerbit PT. BPFE (Badan Penerbitan Fakultas Ekonomi)-Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Baiquni, M., (2004). Membangun Pusat-Pusat di Pinggiran Otonomi di Negara Kepulauan. Penerbit Kerjasama ideAs (Institute for Development and Environment Studies) dan PKPEK (Perkumpulan untuk Kajian dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan), Yogyakarta.
- Budiman, Arief, (1996). Teori Pembangunan Dunia Ketiga, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- I. Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus RI., (2019). Siaran Pers : Kawasan Ekonomi Khusus Sorong diresmikan dan siap memajukan ekonomi Papua Barat (Jumat, 11 Oktober 2019 | 19:43 WIB). <https://kek.go.id/index.php?berita/2019/10/Resmi-Beroperasi-KEK-Sorong-Siap-Majukan-Ekonomi-Papua-Barat-258>
- Dunn, William N., (1998). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Gadjah Mada University Press,

Yogyakarta.

Tarigan, Robinson, 2009. Pengantar Ekonomi Regional. Penerbit PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Tim Dosen Kebijakan Publik, (2004). Analisis Kebijakan Publik. Diklat Kuliah - MAP-UGM, Yogyakarta.

Todaro, Michael P., (2000), Ekonomi Pembangunan, Penerbit Erlangga, Jakarta.